



# WALIKOTA METRO

Jl. A.H. Nasution No. 3 Metro 34100 Lampung Telp. (0725) 41700, Fax (0725) 49500  
www.metrokota.go.id

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 12 TAHUN 2010

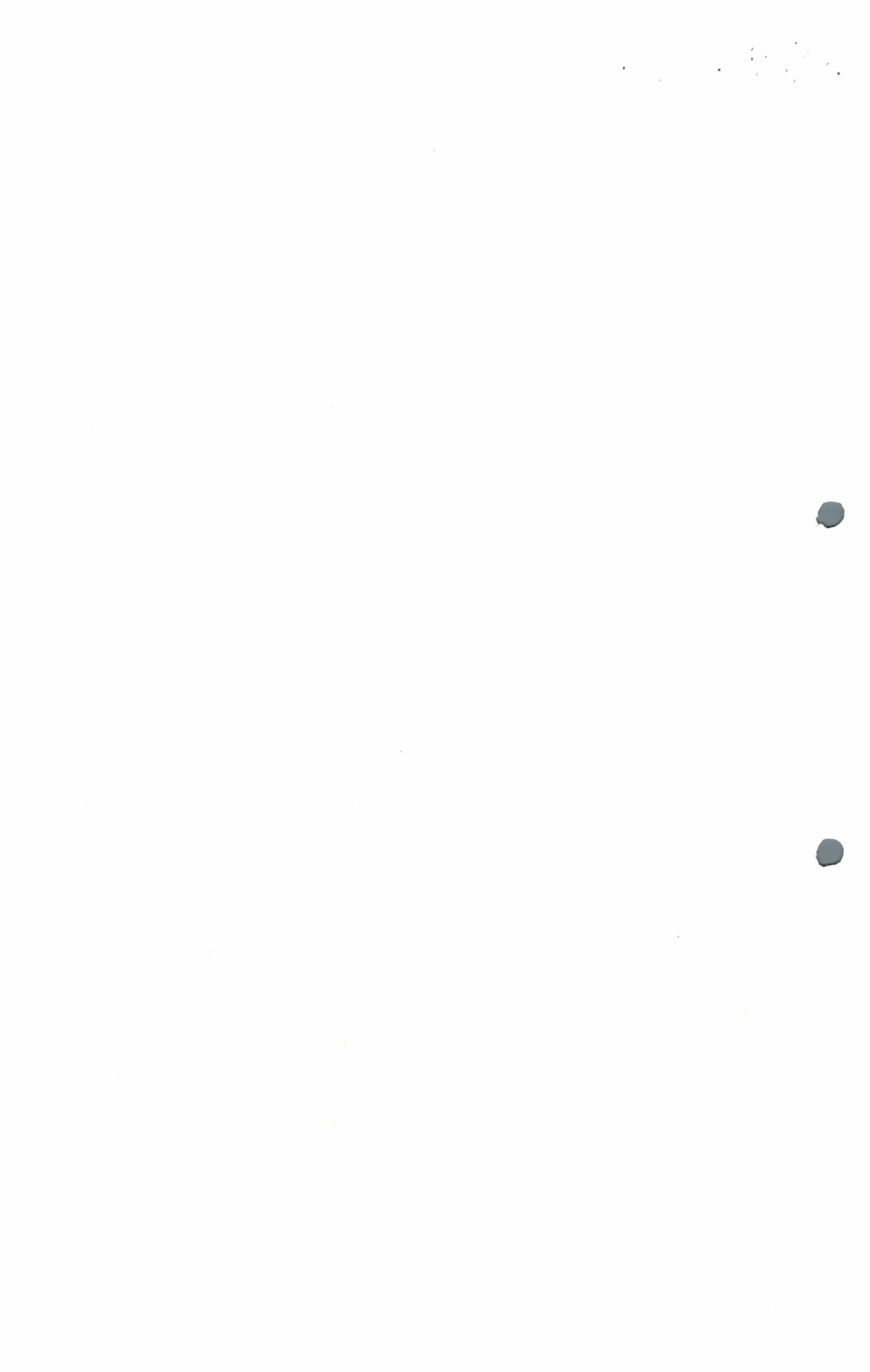
### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 ada ketentuan yang harus diubah dan dihapus sehingga perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota tentang petunjuk operasional dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 17) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 01);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2005**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 (Lembaran daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 01 di ubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Permohonan sebagaimana di maksud pasal 6 di atas diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :  
Untuk bangunan fungsi I,II,III,IV,V dan bangunan-bangunan lainnya :
  - a. Izin peruntukan tanah (IPPT)
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - c. Fotocopy Bukti hak atas tanah

Dear Sir,  
I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been received and is currently under review.

We are impressed with your qualifications and would like to invite you for an interview. The interview will be held on [Date] at [Time] in our office at [Address].

Please bring with you your original degree certificates and a recent passport-sized photograph. If you have any questions, please do not hesitate to contact our HR department.

We look forward to meeting you and discussing the details of the position. Thank you for your interest in joining our organization.

Yours faithfully,  
[Signature]  
[Name]  
[Title]

[Company Name]  
[Address]  
[City, State, Zip Code]

Enclosed for you are [Number] copies of the job description and application form. Please complete and return them to the address above.

If you are unable to attend the interview, please inform us as soon as possible. We appreciate your understanding.

Thank you for your time and consideration. We hope to hear from you soon.

Very truly yours,  
[Signature]

[Name]  
[Title]

[Company Name]  
[Address]

- d. Fotocopy tanda lunas PBB terakhir.
- e. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh permohonan sendiri.
- f. Surat keterangan daya dukung tanah dari laboratorium dan diperhitungkan beban terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 (empat) ke atas.

(2) Untuk bangunan fungsi IV selain syarat tersebut ayat (1) pasal ini ditambah dengan :

- a. Rekomendasi Akte Pendirian Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sah.
- b. Surat Pernyataan permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis, serta garis sempadan jalan koefisien dasar bangunan dan koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh Walikota, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini dan Berita Acara Pemeriksaan Sempadan Rooi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.
- c. Fotocopy Rencana Tata Bangunan Prasarana kawasan Industri yang disetujui oleh Walikota dengan menunjukkan kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri.
- d. Memiliki izin Undang-Undang gangguan, kecuali bagi yang keberadaan wajib amdal atau berlokasi didalam kawasan yang telah ditentukan.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 3 April 2010

**WALIKOTA METRO,**   
  
**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
Pada Tanggal 3 April 2010

**SEKERTARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**ZAINI NURMAN**

1952

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is still in a state of depression, and that the government has taken various measures to stimulate it. The report also mentions the progress of the reconstruction work, and the state of the public services.

In the second part, the report discusses the financial situation of the country. It is pointed out that the government has managed to reduce its deficit, and that the public debt has been kept under control. The report also mentions the progress of the financial reforms, and the state of the public accounts.

The third part of the report deals with the social situation in the country. It is noted that the government has taken various measures to improve the living conditions of the people, and that the public services have been improved. The report also mentions the progress of the social reforms, and the state of the public opinion.

In the fourth part, the report discusses the foreign relations of the country. It is pointed out that the government has maintained a policy of neutrality, and that the country has been able to establish friendly relations with all the major powers. The report also mentions the progress of the diplomatic work, and the state of the international situation.

The fifth part of the report deals with the internal security of the country. It is noted that the government has taken various measures to maintain law and order, and that the country has been able to avoid any serious disturbances. The report also mentions the progress of the internal security work, and the state of the public safety.

In the sixth part, the report discusses the progress of the reconstruction work. It is pointed out that the government has managed to complete a large number of projects, and that the country has been able to restore its infrastructure. The report also mentions the progress of the reconstruction work, and the state of the public services.

The seventh part of the report deals with the state of the public services. It is noted that the government has taken various measures to improve the quality of the public services, and that the country has been able to provide a high standard of living to its people. The report also mentions the progress of the public services work, and the state of the public opinion.

In the eighth part, the report discusses the state of the public opinion. It is pointed out that the government has managed to gain the confidence of the people, and that the country has been able to maintain a high level of public support. The report also mentions the progress of the public opinion work, and the state of the public safety.

The ninth part of the report deals with the state of the public safety. It is noted that the government has taken various measures to ensure the safety of the people, and that the country has been able to maintain a high level of public safety. The report also mentions the progress of the public safety work, and the state of the public opinion.

In the tenth part, the report discusses the state of the public opinion. It is pointed out that the government has managed to gain the confidence of the people, and that the country has been able to maintain a high level of public support. The report also mentions the progress of the public opinion work, and the state of the public safety.

The eleventh part of the report deals with the state of the public safety. It is noted that the government has taken various measures to ensure the safety of the people, and that the country has been able to maintain a high level of public safety. The report also mentions the progress of the public safety work, and the state of the public opinion.

In the twelfth part, the report discusses the state of the public opinion. It is pointed out that the government has managed to gain the confidence of the people, and that the country has been able to maintain a high level of public support. The report also mentions the progress of the public opinion work, and the state of the public safety.